



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Normalisasi Sungai di DKI Telan Rp 1,3 T

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta siap menghadapi musim hujan yang diprediksi pada November mendatang. Penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur terus dilakukan, bahkan DKI mengalokasikan Rp1,3 triliun untuk normalisasi sungai.

Antisipasi banjir di wilayah Jakarta sudah digencarkan sejak awal 2018. "Normalisasi terus berjalan. Sederhana saja. Kampung Melayu dua-tiga tahun terakhir kan Alhamdulillah. Bukit Duri bisa dilihat yang memang viral, saat ini enggak ada," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Teguh Hendrawan di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Menurut dia, anggaran normalisasi Rp1,3 triliun itu digunakan normalisasi waduk Rp400 miliar dan pembebasan lahan untuk mendukung normalisasi Rp900 miliar.

Untuk normalisasi kawasan rawan banjir, Pemprov DKI terkendala keberadaan masyarakat dan bangunan. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) sudah mempertanyakan progres tersebut. Sebab, BBWSCC tidak akan mengalokasikan pendanaan pada RAPBN 2019 apabila pada tahun ini pengerjaannya pasif. "Pak Bambang (Kepala BBWSCC) kemarin ke Balai Kota konfirmasi ke Pak Gubernur dan normalisasi pembebasan lahan harus tetap jalan," kata Teguh.

Berdasarkan evaluasi periode Januari-Juni 2018 terdapat 180 titik genangan, hilang dalam waktu 2-3 jam. Sebanyak 80 titik di antaranya hanya pengulangan seperti di Bundaran Slipi, Jakarta Barat, yang saat itu ada pembangunan dan belum dinormalisasi di Kembangan. Begitu juga di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang diprediksi sama seperti tahun lalu.

Selain normalisasi, Dinas SDA DKI juga diminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjalankan konsep naturalisasi di lokasi-lokasi yang terlihat masyarakat. Naturalisasi sudah dilakukan di kawasan yang tidak berisiko, seperti di Setu Babakan dan Kampung Rambutan.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono juga mengatakan, persiapan Pemprov DKI menghadapi banjir secara umum baru akan teruji saat musim hujan tiba. Berdasarkan pengamatannya, terdapat tiga hal yang perlu dicatat. Pertama, seluruh saluran air/drainase di Kota Jakarta belum sepenuhnya bebas dari lumpur dan sampah sehingga besar kemungkinan tetap ada genangan, terutama di jalan dan persimpangan jalan serta *underpass*.

Kedua, pengerukan sungai juga baru terbatas di beberapa sungai, sementara proses pembebasan lahan untuk pelebaran sungai terhenti sehingga permukaan yang dibatasi sungai dipastikan akan terkecuali banjir kembali. "Ketiga, pengerukan dan penataan danau/waduk/situ (daerah tampungan air) belum maksimal sehingga kapasitas masih terbatas dan tidak banyak membantu mengurangi banjir," ujar Nirwono.

Terkait konsep naturalisasi yang diusung Anies sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga saat ini dirinya belum pernah melihat. "Itulah salah satu alasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda pener-

apan bantaran kali pada tahun ini sampai ada kejelasan naturalisasi tersebut," katanya.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyarankan agar proyek normalisasi kali dipercepat guna mengantisipasi banjir sebab musim penghujan diprediksi mulai Oktober dan puncaknya Januari mendatang.

"Bisa dikatakan proyek kali harus segera selesai," kata Deputy Bidang Meteorologi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo beberapa waktu lalu.

Meski saat ini hujan menyebabkan genangan di sejumlah titik, itu belum cukup parah karena hujan yang terjadi akibat siklon tropis mangkhut dari Filipina. "Dampak siklon mangkhut membuat Pulau Jawa, Kalimantan hingga sisi Sumatera bagian timur diguyur hujan," ucapnya.

Menurut dia, tanpa adanya antisipasi yang tepat bukan tak mungkin genangan dan banjir akan terjadi, sedangkan hujan dengan intensitas tinggi BMKG memprediksi akan terjadi awal Januari 2019. "Saat itulah puncak musim hujan terjadi dengan volume air yang turun cukup banyak, bahkan hujan bisa turun seharian penuh," kata Mulyono.

Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menyiapkan 51 mesin pompa

untuk menyedot air bila terjadi genangan. Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Firmansyah mengatakan seluruh mesin pompa di sebar di 26 titik rumah pompa. Pihaknya juga menyiapkan 152 petugas di delapan kecamatan.

Dari 26 titik rumah pompa itu, satu mesin pompa di Rumah Pompa Madrasah saat ini masih dalam proses perbaikan. "Kita juga menyiapkan dua unit pompa mobile dan lima unit pompa trailer yang siap beroperasi," ucapnya.

◊ bimasetiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

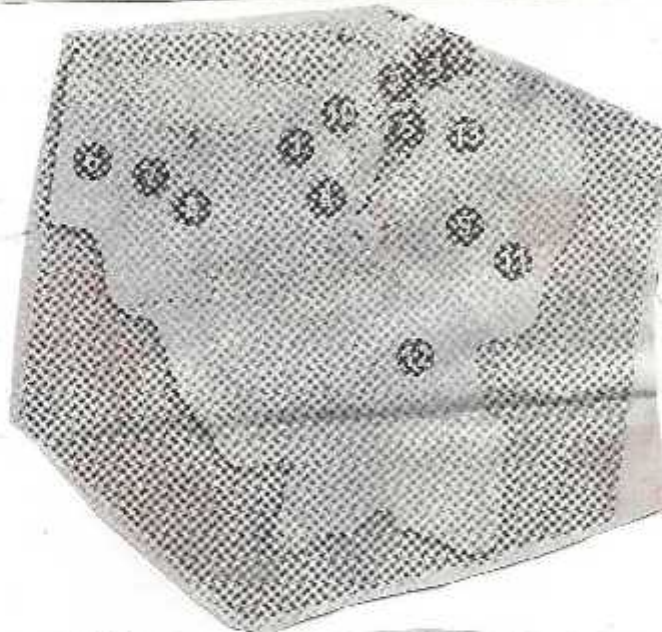
Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sinco	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Normalisasi Sungai di DKI Telan Rp 1,3 T

SIAP HADAPI BANJIR

Puncak hujan diperkirakan Januari 2019. Sejak Januari hingga Oktober ini Pemprov DKI terus mempersiapkan infrastruktur dan perbaikan sarana prasarana untuk mencegah terjadinya banjir.



Rp77,1 triliun

Rp83 triliun

ANGGARAN NORMALISASI

Pembebasan lahan pendukung normalisasi

Rp300 miliar



Normalisasi waduk Rp400 miliar



● Oktober curah hujan kisaran 100-120 mm

● Curah hujan yang menyebabkan banjir di Jakarta pada 2007, 2013, dan 2014 mencapai 200-350 mm

● Januari 2019 diprediksi puncak musim hujan

APBD 2018

APBD-P 2018

NORMALISASI SUNGAI

1. Kali Grogol
2. Kali Baru Barat
3. Kali Baru Timur
4. Kali Krukut
5. Kali Sunter
6. Kali Mookovart
7. Kali Angke
8. Kali Pesanggrahan
9. Kali Cipinang
10. Kali Ciliwung
11. Kali Buaran
12. Kali Kramat Jati
13. Kali Cakung

STRATEGI PERANGKAPAN BANJIR

- Normalisasi dan naturalisasi 13 sungai
- Relokasi warga bantaran kali
- Pembangunan dan penguatan tanggul
- Mengoptimalkan rumah polder
- Menyiagakan 450 pompa dan 30 mobil pompa
- Pembangunan tanggul pengamanan pantai
- Menyiagakan petugas harian lepas (PHL) dan pasukan biru
- Pembangunan sodetan sepanjang 1,27 km, tinggal 600 meter lagi yang lehannya belum dibebaskan



Sumber: Pemprov DKI Jakarta/BVRC